

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Dari tabel diatas Indeks Perubahan Harga Bahan Pokok (IPHB) Kabupaten Pakpak Bharat dapat dilihat dari ukuran yang menunjukkan perubahan harga dari berbagai bahan pokok atau kebutuhan dasar dari waktu ke waktu. Bahan pokok yang dimaksud bisa termasuk pangan seperti beras, minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, jagung pipil kering dan lain-lain yang merupakan kebutuhan utama masyarakat. IPHB ini penting untuk memahami tren inflasi di suatu kabupaten, provinsi dan negara, karena harga bahan pokok yang naik secara signifikan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Indeks ini biasanya dipantau oleh pemerintah dan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan sosial, seperti penentuan subsidi atau bantuan sosial. Peningkatan IPHB dapat menunjukkan adanya tekanan inflasi, sementara penurunan mungkin mengindikasikan stabilitas atau bahkan deflasi dalam sektor tersebut. Dengan demikian dapat kita dari grafik dibawah ini harga bahan pokok di Kabupaten Pakpak Bharat cenderung menurun pada bulan Mei minggu ke-II (-0,84%) sedangkan untuk minggu pertama awal bulan Mei ada kenaikan yang signifikan yaitu 4,05% ini dapat dilihat pada grafik berikut ini :

## Perubahan Harga Bapok Kabupaten Pakpak Bharat TW. II Tahun 2024

Fluktuasi harga bahan pokok sangat berpengaruh pada ekonomi rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah, karena bagian terbesar dari pendapatan masyarakat sering dialokasikan untuk kebutuhan dasar. Oleh karena itu, perubahan harga bahan pokok sering kali menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

Perubahan harga bahan pokok merupakan fenomena yang sering terjadi dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk:

- Musim dan Cuaca:** Kondisi cuaca yang ekstrem seperti kekeringan atau banjir dapat mempengaruhi hasil panen, sehingga menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, dan beras.
- Ketersediaan dan Distribusi:** Gangguan dalam rantai pasokan atau distribusi, seperti masalah transportasi atau kebijakan impor/ekspor, dapat mempengaruhi harga bahan pokok. Misalnya, keterlambatan pengiriman atau kekurangan stok bisa mendorong harga naik.
- Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan seperti penetapan harga maksimum, subsidi, atau bea impor bisa mempengaruhi harga bahan pokok. Contohnya, penghapusan subsidi pada bahan bakar dapat meningkatkan biaya transportasi, yang pada gilirannya meningkatkan harga bahan pangan.
- Kondisi Ekonomi Global:** Perubahan harga komoditas di pasar global, seperti minyak atau gandum, juga dapat mempengaruhi harga bahan pokok secara lokal. Fluktuasi nilai tukar mata uang juga dapat memengaruhi biaya impor, yang bisa mempengaruhi harga barang di pasar domestik.
- Permintaan dan Penawaran:** Hukum dasar ekonomi menyatakan bahwa jika permintaan suatu barang meningkat sementara penawarannya tetap atau berkurang, harga akan naik. Ini sering terjadi pada periode tertentu seperti saat bulan Ramadan atau menjelang hari besar, di mana permintaan bahan pangan tertentu meningkat tajam.
- Spekulasi dan Inflasi:** Terkadang, spekulasi oleh pedagang atau kekhawatiran akan inflasi dapat menyebabkan harga naik meskipun tidak ada perubahan mendasar dalam ketersediaan atau permintaan.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian Inflasi Daerah merupakan tantangan penting bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memerlukan perhatian khusus ada beberapa masalah yang dihadapi untuk mengendalikan inflasi daerah yaitu :

- Keterjangkauan Harga yakni perbedaan harga barang dan jasa antar daerah dapat menyebabkan inflasi tidak merata ini dapat kita lihat harga barang.bahan pokok didaerah terpencil seringkali lebih tinggi dibandingkan didaerah perkotaan.
- Ketersediaan pasokan :

Ketergantungan pada barang impor atau pasokan dari luar daerah karena produksi lokal yang terbatas dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tajam jika terjadi gangguan pasokan.

- Kelancaran distribusi :

Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya, dapat menghambat distribusi barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kenaikan harga.

- Komunikasi efektif :

Belum pahamnya sebagian masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi perlu edukasi yang terus menurun.

- Pengawasan dan Regulasi

Kurangnya pengawasan dan regulasi yang efektif terhadap harga dan distribusi barang dapat memungkinkan praktik spekulasi dan penimbunan, yang dapat memicu inflasi.

- Kebijakan Fiskal dan Moneter Lokal

Keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter di tingkat daerah dibandingkan dengan tingkat nasional dapat mengurangi efektivitas pengendalian inflasi.

- Pengaruh Faktor Eksternal

Inflasi daerah juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, harga minyak dunia, dan kondisi ekonomi global yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.

- Kurangnya Data dan Informasi

Kurangnya data yang akurat dan terkini mengenai harga, produksi, dan distribusi barang dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat dalam pengendalian inflasi.

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat pada triwulan II 2024 sebagai berikut :

1. a) Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual antara Kemendagri dengan Tim TPIN,TPIP,TPID Kabupaten/Kota se-Indonesia. Rapat dilaksanakan melalui zoom meeting setiap hari senin setiap minggunya yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat didampingi Perwakilan Inspektorat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bagian Perekonomian dan Kesra beserta pejabat fungsional di Setda Bagian Perekonomian dan Kesra Kabupaten Pakpak Bharat.

1. b) Tim TPID melaksanakan monitoring ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok dalam rangka menjaga kestabilan nilai Inflasi serta menjelang hari ray

Hari / tanggal : Senin, 1 April 2024

Tempat : Kecamatan Salak

Tim TPID melaksanakan monitoring ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok dalam rangka menjaga kestabilan nilai Inflasi serta menjelang hari raya idul fitri. Hasil monitoring dari grosir dan indomaret, untuk ketersediaan terpantau aman serta harga bahan pokok lain relatif stabil. Kegiatan monitoring dan evaluasi stok serta harga pangan baik ditingkat produsen, grosir, maupun eceran selalu dipersiapkan untuk mengantisipasi pergerakan harga, apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, baik disebabkan gangguan pasokan maupun distribusi bahan pangan.

#### c)Gerakan Pangan Murah

Hari / tanggal : Rabu / 3 April 2024

Tempat : Depan Kantor BRI Teras Sibande

Tim TPID Kabupaten Pakpak Bharat, Setda Bagian Perekonomian, Dinas Katahanan Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan Kancilog Kaban Jahe dan Dinas Koperasi,UMKM,Perindustrian dan Perdagangan menjual minyak goreng, beras, tepung terigu, gula pasir dan hasil pertanian (tomat, cabe dan bawang merah) di bawah harga pasaran. Dalam operasi itu, gula pasir dijual dengan harga Rp. 17.000/kg.Beras SPHP Rp. 55.000/zak (5kg). Sedangkan minyak goreng dijual dengan harga Rp. 16.000/kg. Selain itu juga bahan pangan lainnya dijual dengan harga lebih murah. Kegiatan ini bagian dari upaya mengantisipasi hal yang menjadi perhatian publik yaitu kenaikan harga pangan saat ini ataupun jika ada ketimpangan harga yang terjadi di pasar untuk kebutuhan pangan masyarakat. Gerakan pangan murah ini juga diselenggarakan untuk membantu meringankan beban masyarakat.

1. d) Monitoring dan pemantauan harga serta ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Tradisional oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Pakpak Bharat dengan Bagian Perekonomian dan Kesra, Inspektorat

Hari / tanggal : Senin, 1 April 2024

Tempat : Kecamatan Salak

Tim TPID melaksanakan monitoring ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok dalam rangka menjaga kestabilan nilai Inflasi serta menjelang hari raya idul fitri. Hasil monitoring dari grosir dan indomaret, untuk ketersediaan terpantau aman serta harga bahan pokok lain relatif stabil. Kegiatan monitoring dan evaluasi stok serta harga pangan baik ditingkat produsen, grosir, maupun eceran selalu dipersiapkan untuk mengantisipasi pergerakan harga, apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, baik disebabkan gangguan pasokan maupun distribusi bahan pangan.

1. e) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pakpak Bharat melaksanakan monitoring data informasi harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya yang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk memperoleh data harga pasar sesuai dengan komoditi di sektor perdagangan, agar dapat mengetahui fluktuasi harga untuk selanjutnya dievaluasi dalam mencari faktor-faktor penyebab dan mencari solusi pemecahannya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Hari Rabu, Kamis dan Jumat di 4 (empat) pasar Kecamatan yang dianggap sebagai barometer di Pakpak Bharat yaitu Pasar Singgabung, Pasar Sibande, Pasar Klohi dan Pasar Sukarama Hasil dari kegiatan monitoring ini, dimana dapat menyajikan/memberikan informasi perkembangan harga yang berlaku pada saat untuk diisi ke Aplikasi KP2SP dan website SiHarapanku yang adminnya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pakpak Bharat.

#### 4. 4. EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Pakpak Bharat pada triwulan II 2024 melibatkan penilaian terhadap efektivitas kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dievaluasi adalah sebagai berikut :

- **Kinerja Indikator Inflasi:**
  - Mengukur tingkat inflasi di daerah tersebut selama periode tertentu dan membandingkannya dengan target inflasi yang telah ditetapkan. Penurunan atau stabilitas inflasi menunjukkan efektivitas kebijakan yang diimplementasikan.
- **Efektivitas Kebijakan Harga dan Subsidi:**
  - Menilai kebijakan harga yang diterapkan oleh pemerintah daerah, termasuk pengendalian harga barang-barang pokok dan pemberian subsidi. Efektivitas kebijakan ini dapat dilihat dari bagaimana harga barang pokok di pasar tetap stabil atau mengalami kenaikan yang wajar.
- **Ketersediaan dan Distribusi Barang Pokok:**
  - Evaluasi ketersediaan dan distribusi barang pokok di daerah, termasuk seberapa

baik infrastruktur distribusi mendukung penyediaan barang-barang tersebut di seluruh wilayah. Distribusi yang baik biasanya akan mencegah lonjakan harga akibat kelangkaan.

- **Pengawasan dan Penegakan Hukum:**

- Menilai efektivitas pengawasan terhadap praktik-praktik spekulasi, penimbunan, dan manipulasi harga di pasar. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dapat membantu menjaga stabilitas harga.

- **Kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan:**

- Mengkaji kebijakan yang mendukung sektor pertanian lokal, seperti program peningkatan produksi, dukungan teknologi, dan akses ke pasar. Kebijakan yang mendukung ketahanan pangan lokal dapat membantu mengendalikan inflasi.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Pakpak Bharat pada triwulan II 2024 melibatkan penilaian terhadap efektivitas kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dievaluasi adalah sebagai berikut :

- **Kinerja Indikator Inflasi:**

- Mengukur tingkat inflasi di daerah tersebut selama periode tertentu dan membandingkannya dengan target inflasi yang telah ditetapkan. Penurunan atau stabilitas inflasi menunjukkan efektivitas kebijakan yang diimplementasikan.

- **Efektivitas Kebijakan Harga dan Subsidi:**

- Menilai kebijakan harga yang diterapkan oleh pemerintah daerah, termasuk pengendalian harga barang-barang pokok dan pemberian subsidi. Efektivitas kebijakan ini dapat dilihat dari bagaimana harga barang pokok di pasar tetap stabil atau mengalami kenaikan yang wajar.

- **Ketersediaan dan Distribusi Barang Pokok:**

- Evaluasi ketersediaan dan distribusi barang pokok di daerah, termasuk seberapa baik infrastruktur distribusi mendukung penyediaan barang-barang tersebut di seluruh wilayah. Distribusi yang baik biasanya akan mencegah lonjakan harga akibat kelangkaan.

- **Pengawasan dan Penegakan Hukum:**

- Menilai efektivitas pengawasan terhadap praktik-praktik spekulasi, penimbunan, dan manipulasi harga di pasar. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dapat membantu menjaga stabilitas harga.

- **Kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan:**

- Mengkaji kebijakan yang mendukung sektor pertanian lokal, seperti program peningkatan produksi, dukungan teknologi, dan akses ke pasar. Kebijakan yang mendukung ketahanan pangan lokal dapat membantu mengendalikan inflasi.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk mengendalikan inflasi di tingkat daerah secara efektif, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah:

**1. Penguatan Infrastruktur Distribusi:**

- Meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi dan logistik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas penyimpanan, untuk memastikan distribusi barang dan jasa yang lebih efisien dan merata di seluruh daerah.

**1. Diversifikasi Sumber Pangan dan Barang Pokok:**

- Mendorong diversifikasi produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah atau impor. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada petani dan produsen lokal untuk meningkatkan produksi.

**1. Pengawasan Harga dan Penegakan Hukum:**

- Meningkatkan pengawasan terhadap harga barang dan jasa di pasar untuk mencegah spekulasi, penimbunan, dan praktik-praktik yang merugikan konsumen. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran harga perlu dilakukan.

**1. Pengembangan Sistem Informasi Harga:**

- Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi harga yang terintegrasi untuk memantau pergerakan harga barang pokok secara real-time. Informasi ini harus dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan transparansi.

**1. Subsidi dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran:**

- Memberikan subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat mengurangi dampak inflasi terhadap daya beli mereka. Program ini harus diawasi dengan ketat untuk menghindari penyelewengan.

**1. Kerjasama Antar Daerah:**

- Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam hal perdagangan, pertukaran informasi, dan koordinasi distribusi. Kerjasama yang baik dapat membantu menyeimbangkan pasokan dan harga barang pokok di berbagai daerah.

**1. Peningkatan Kapasitas Produksi Lokal:**

- Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa. Pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan, akses permodalan, dan dukungan pemasaran.

**1. Penyediaan Cadangan Pangan Daerah:**

- Membentuk cadangan pangan daerah yang dapat digunakan untuk menstabilkan harga ketika terjadi lonjakan permintaan atau gangguan pasokan. Cadangan ini dapat dikelola oleh pemerintah daerah dengan mekanisme yang transparan.

**1. Edukasi dan Pelatihan Masyarakat:**

- Melakukan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya stabilitas harga dan cara mengelola keuangan dengan baik. Ini dapat membantu masyarakat lebih siap menghadapi fluktuasi harga.

**1. Pemanfaatan Teknologi Digital:**

- Memanfaatkan teknologi digital dalam sistem distribusi dan perdagangan, seperti platform e-commerce lokal, untuk memperluas akses pasar bagi produsen lokal dan mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang dengan harga yang wajar.

**1. Monitoring dan Evaluasi Berkala:**

- Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi secara berkala untuk menilai efektivitas dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Hal ini memastikan kebijakan tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.